

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengukuran tanah hak milik (Letter C) di Kecamatan Kalasan menggunakan alat ukur berupa meteran, theodolite dan total station. Penggunaan alat-alat tersebut menghasilkan koordinat batas-batas bidang tanah sehingga dapat diketahui bentuk, batas dan luas tanah yang dituangkan dalam gambar ukur yang merupakan bagian dari sertifikat.

Pelaksanaan pengukuran dalam hal ini hasil pengukuran yang oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Sleman tidak sesuai dengan ukuran yang ada pada Letter C. Ke 25 orang responden tersebut merelakan luas tanahnya berkurang. Apabila responden tidak menerima luas tanahnya berkurang maka proses pendaftaran untuk penerbitan sertifikat akan dibatalkan dan akan dilakukan pengukuran ulang kembali. Hal ini mengakibatkan dalam penerbitan sertifikat akan memakan waktu yang lama dan pemohon akan mengeluarkan biaya lagi untuk pengukuran tanah ulang. Selain itu responden yang tanahnya berkurang sebelumnya sudah diberikan pemahaman oleh dukuh setempat agar dapat menerima apabila tanahnya berkurang untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman di kemudian hari.

2. Pelaksanaan pengukuran tanah hak milik (Letter C) sudah mewujudkan kepastian hukum bagi 10 orang pemilik tanah dengan Letter C yang

sedang dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah dimana sampai pada tahap pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan keberatan/gugatan terhadap hasil pengukuran tanah meskipun sertipikat belum diterbitkan dan bagi 15 orang pemilik tanah yang mengkonversi Letter C sudah mewujudkan kepastian hukum karena sudah memperoleh sertipikat.

C. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat Kantor Pertanahan Sleman untuk terus meningkatkan kepercayaan dan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada pemegang hak milik atas tanah yang akan mendaftarkan tanahnya khususnya tanah yang statusnya Letter C dalam hal pemberian hak milik atas tanah.
2. Kepada Kepala Desa setempat untuk memberikan penyuluhan kepada pemegang hak milik atas tanah akan pentingnya pendaftaran tanah bagi pemegang hak milik atas tanah yang kurang mampu yang akan mendaftarkan tanah miliknya.
3. Kepada masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah yang masih memiliki tanah dengan bukti kepemilikan Letter C agar melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak milik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adrian Sutedi, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1 Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zamal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A.P Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama/Cetakan Ke-3, Prenada Media, Jakarta
- R. Soeprapto, 1986, *UUPA dalam praktek*, Mitra Sari, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama/Cetakan Ke 5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Skripsi :

- Hermiana Emiliana Indak, 2007, *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Eriska Virbi Arsari, 2009, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Melalui Land Management and Policy Development Program Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulonprogo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Budhy Bakthi Sosialisasi Yohanis Sir, 2011, *Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Hak Milik Dalam Proses Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Memperoleh Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara*,

*Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan
Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah